# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

BBM merupakan salah satu sumber tenaga terbesar bagi kehidupan di muka bumi ini. Hampir semua yang dipergunakan oleh manusia menggunakan BBM sebagai sumber energinya. Tentunya hal tersebut menyebabkan permintaan akan BBM menjadi sangat tinggi sedangkan persediaan BBM berkurang akibatnya terjadilah kenaikan harga minyak dunia. Kenaikan harga minyak dunia itu ternyata juga sangat berpengaruh kepada kemampuan pemerintah dalam memberikan subsidi BBM kepada masyarakat. Subsidi yang selama ini diberikan dalam bentuk pengurangan harga BBM sedikit demi sedikit dikurangi. Tentunya hal tersebut menyebabkan kenaikan harga BBM.

Subsidi pemerintah yang selama ini diberikan, dialihkan pemberiannya melalui pemberian subsidi secara langsung kepada rakyat miskin. Pemberian subsidi secara langsung tersebut diberikan secara bertahap. Tahap pertama pemberiannya diberikan sebesar Rp.300.000,00/ kepala keluarga. Tentu saja dana kompensasi kenaikan BBM tersebut diberikan kepada rakyat miskin. Menurut Mubyarto miskin adalah situasi kekurangan yang terjadi karena bukan dikehendaki oleh si miskin melainkan karena tidak dapat dihindari oleh kekuatan apapun atau kemampuan yang ada didirinya. Kemiskinan itu ditandai dengan sikap atau tingkah laku yang menerima keadaan seakan akan

rendahnya produktifitas, terbatasnya modal yang dimiliki, rendahnya pendapatan, serta kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan.[1]

Kenaikan harga BBM itu sendiri dilaksanakan mulai tanggal 1 oktober 2005 dengan kisaran mulai dari 87,5% -185,7%. Landasan hukum dari kenaikan harga BBM tersebut adalah Inpres No 12 tentang Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebenarnya pemerintah masih tetap mengeluarkan subsidi untuk berbagai jenis BBM tersebut. Subsidi terbesar masih diberikan kepada minyak tanah yaitu sebesar Rp 3600. Namun begitu presentase kenaikan minyak tanah juga merupakan presentase kenaikan terbesar yaitu mencapai 185,7%. Namun jika secara kuantitas maka kenaikan terbesar dialami oleh BBM jenis solar yaitu mencapai Rp 2200.

Kenaikan harga BBM ini ternyata juga membuat inflasi di negara kita juga meningkat sangat drastis. jelas bahwa betapa tingkat inflasi pada bulan Oktober meningkat dengan sangat tajam. Hal ini tentunya merupakan pengaruh dari kenaikan harga BBM yang ditetapkan oleh pemerintah.

Disisi lain inflasi yang meningkat sangat tajam tersebut tidak diimbangi dengan peningkatan daya beli masyarakat. Sehingga dapat diasumsikan rakyat miskin di negara ini juga semakin banyak. Masalah lain yang muncul dari pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini adalah banyak sekali fakta yang ditemukan dilapangan mengungkapkan bahwa banyak sekali terjadi penyelewengan pemberian BLT ini. Beberapa contoh kasus penyelewengan ini misalnya masyarakat yang sebenarnya dikategorikan

---

[1] [illegible] Aditya Media, Yogyakarta, 1994 hal 17

Pada kenyataannya dilapangan banyak ditemukan fakta bahwa orang orang yang tidak masuk kriteria miskin menurut BKKBN tadi mendapatkan dana BLT ini. Hal ini sangat menarik untuk diteliti, mengingat seharusnya data tersebut diperuntukan kepada masyarakat miskin. Di Kecamatan Temon sendiri sebenarnya tidak terlalu banyak rumah tangga miskin yang mendapatkan dana Bantuan Langsung Tunai, namun penulis melihat beberapa fakta penyelewengan dana Bantuan Langsung Tunai di Kecamatan Temon sehingga kemudian menarik untuk diteliti. Berikut daftar tabel rumah tangga miskin di Kecamatan se Kabupaten Kulon Progo.

**Tabel 1.1**

**Jumlah Rumah Tangga Miskin Penerima BLT**

**di Kabupaten Kulon Progo**

| No | Kecamatan | Jumlah KK |
|---|---|---|
| 1 | Temon | 2644 |
| 2 | Wates | 3201 |
| 3 | Panjatan | 3502 |
| 4 | Galur | 2604 |
| 5 | Lendah | 3450 |
| 6 | Sentolo | 4007 |
| 7 | Pengasih | 4782 |
| 8 | Kokap | 4830 |
| 9 | Girimulyo | 3574 |
| 10 | Nanggulan | 2426 |
| 11 | Kalibawang | 3789 |
| 12 | Samigaluh | 3536 |
| | Jumlah | 42345 |

## B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diambil permasalahan sebagai berikut:

1. *Bagaimanakah Implementasi Kebijakan Program Bantuan langsung Tunai Kepada Masyarakat Miskin.?*
2. *Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi pelaksanaan program pemberian dana kompensasi BBM kepada masyarakat miskin.?*

## C. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

a. Ingin mengetahui hal-hal yang ada di sekitar Bantuan Langsung Tunai.
b. Ingin mengetahui faktor-faktor penyebab penyelewengan Bantuan Langsung Tunai.

## D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah

a. Bagi instansi yang bersangkutan

   Dapat menjadikan sebuah acuan bagi pelaksanaan program pemberian Sumbangan langsung tunai sebagai kompensasi kenaikan harga BBM ini.

b. Bagi masyarakat

   Setidaknya penyusunan tulisan ini dapat menjadi sumbangan yang dapat

ada di sekitar pelaksanaan program Sumbangan Langsung Tunai ini dapat diketahui oleh masyarakat

c. Bagi penulis

Sebagai salah satu tanggung jawab moral penulis sebagai seorang mahasiswa.

d. Bagi jurusan

Sebagai wacana untuk penelitian selanjutnya.

## E. Kerangka Dasar Teori

### 1. Implementasi

a. Implementasi kebijakan

Implementasi adalah sebuah proses dalam mendapatkan sumber daya tambahan sehingga dapat mengukur apa-apa yang telah dikerjakan.[3]

Kata implementasi berasal dari sebuah kamus *Webster*, yang merumuskan secara singkat bahwa *to implement* (mengimplementasikan) berarti:

*"to provide the means for carrying out to give practical effect to (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang nantinya menimbulkan dampak atau akibat sesuatu)".*

Menurut Van Meter dan Van Horn yang merumuskan bahwa proses implementasi adalah sebagai tindakan-tindakan yang

[3] Charles O. ... kebijakan publik, Ed Nasbir Rudiman, 1991

dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat atau kelompok–kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tunjangan-tunjangan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Sedangkan pengertian dari kebijakan atau policy sendiri adalah sebagai berikut :

"Serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah, yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan masyarakat".

Kemudian pengertian dari implementasi kebijakan seperti apa yang telah dirumuskan oleh Mazmanian dan Sabatier adalah sebagai berikut;

"Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-Undang umum. Namun dapat pula bentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting keputusan badan peradilan lainnya. Lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas dan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk mengukur proses implementasi."

Implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai sebuah proses melaksanakan keputusan kebijakan biasnya dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Peradilan atau

kebijakan perlu adanya proses untuk tercapainya kebijakan yang dapat dilaksanakan dan diterapkan di instansi pemerintahan maupun di masyarakat luas. Gambar dibawah ini adalah sebagian model proses implementasi kebijakan.

**Bagan model proses implementasi kebijakan**[4]

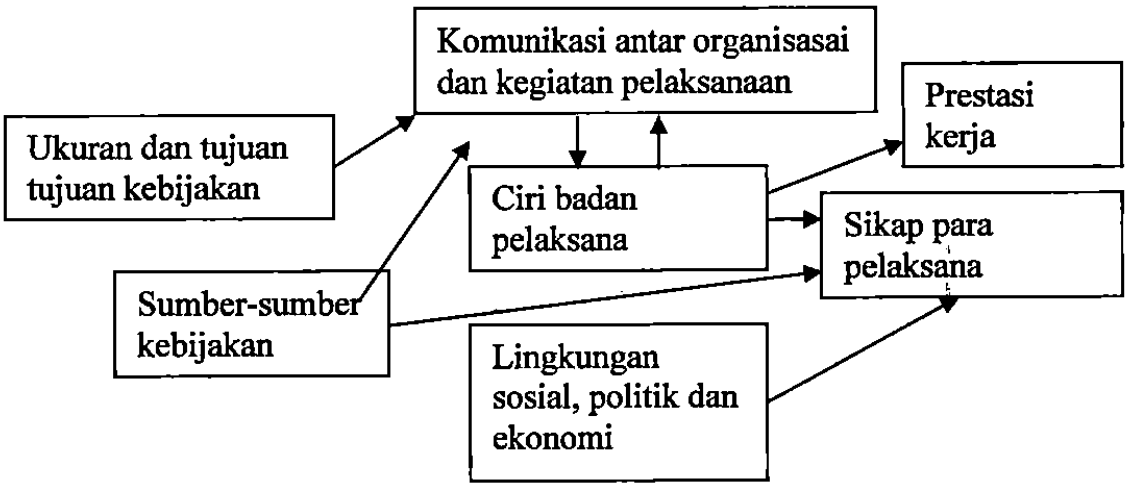


Menurut Van Meter dan Van Harn setidaknya ada 2 buah tipologi kebijakan menurut:

a. Jumlah masing-masing perubahan yang dihasilkan.
b. Jangkauan kesepakatan terhadap tunjangan diantara pihak-pihak yang terlibat implementasi.

Kemudian dari bagan diatas nampak beberapa variabel bebas dalam proses implementasi kebijakan yang saling berkaitan yaitu:

a. Ukuran dan tunjangan kebijakan.
b. Sumber-sumber kebijakan.

c. Ciri atau sifat badan pelaksana

d. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan pelaksanaan

e. Sikap dari para pelaksana

f. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

Variabel-variabel kebijakan diatas bersangkut paut dengan tujuan-tujuan yang telah digariskan dan sumber-sumber yang tersedia. Pusat perhatian pada bagian-bagian pelaksana meliputi organisasi formal maupun non formal, sedangkan komunikasi antar organisasi terkait beserta kegiatan pelaksanaanya mencakup antar hubungan di dalam lingkungan sistem politik dan kelompok sasaran. Akhirnya pusat perhatian sikap para pelaksana mengantarkan kita pada telaah mengenai orientasi dari mereka yang mengoperasionalkan program di lapangan. Peran penting dari sebuah implementasi kebijakan adalah mengidentifikasikan variabel-variabel yang mempengaruhi tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Variabel yang dimaksud dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori besar yaitu:

a. Mudah tidaknya masalah yang akan digarap untuk dikendalikan.

b. Kemampuan keputusan kebijakan untuk menstrukturkan secara tepat proses implementasinya.

c. Pengaruh langsung berbagai variabel politik terhadap keseimbangan dukungan bagi tujuan yang termuat dalam

b. Implementasi Progam

Proses kebijakan dapat pula kita lihat dari dua komponen utamanya yaitu aktifitas dan produk. Aktivitas formulasi dan legitimasi menghasilkan keputusan kebijakan. Keputusan kebijakan mengharuskan diberlakukannya proses implementasi. Dalam proses ini nantinya terjadi berbagai aktifitas antara lain:

a. Pengadaan sumber daya, baik sumber daya alam, teknologi, manusia maupun sumber daya keuangan.
b. Interpretasi terhadap kebijakan.
c. Perencanaan ( penyusunan rencana, tindakan untuk melaksanakan keputusan kebijakan )
d. Pengorganisasian ( pendayagunaan organisasi publik, perlibatan lembaga-lembaga lain, koordinasi kegiatan )
e. Penyediaan jasa dan layanan.

**2. Kemiskinan**

Kemiskinan bisa diterjemahkan sebagai suatu kondisi kekurangan yang dialami seorang atau suatu keluarga. Kemiskinan juga lazim dilukiskan sebagai kekurangan, pendapatan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang paling pokok. Mereka dikatakan berada dibawah [illegible]

kebutuhan hidup yang paling pokok, seperti pangan, pakaian, tempat berteduh dan lainnya.[5]

Konsep kemiskinan yang dianut secara resmi memang mengacu pada kemampuan penduduk untuk memenuhi tangkat kehidupan tertentu. Dalam hal ini tingkat kehidupan didekati dengan pemenuhan konsumsi sekelompok bahan makanan dan bukan makanan. Sekalipun konsep ini terasa sangat ekonomi, tetapi menurut Darwin Nasution, gaya hidup dan kebiasaan konsumsi merupakan fenomena sosio-ekonomis.[6]

Sementara itu, John Friedmann mendefinisikan arti kemiskinan dalam dimensi yang lebih luas, bukan lagi sekedar fenomena ekonomis. Kemiskinan diartikan sebagai ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasikan basis kekuasaan sosial yang meliputi antara lain: modal produktif atau aset-aset ( misal tanah, perumahan, peralatan, dll). Organisasi sosial dan politik yang dapat digunakan untuk mencapai kepentingan bersama (misal koperasi), pengetahuan dan keterampilan yang memadai, informasi yang berguna untuk memajukan kehidupan.[7]

Setelah Indonesia dihantam krisis berkepanjangan, maka tidak dapat dipungkiri lagi bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia semakin meningkat. Bahkan bila tidak segera diatasi, bukan tidak mungkin bila dimasa depan masalah kemiskinan ini menjadi sebuah masalah yang

---

[5] Dra. I.L.Pasaribu dan Drs.B.simanjuntak, S.H, *Sosiologi Pembangunan*, Tarsito, Bandung, 1982, Hal 264

[6] Darwin Nasution, Faktor-Faktor penyebab kemiskinan Dan Kesenjangan di Indonesia, Prospektif, Vol 5 No 4, 1993

[7] John Friedmann, dalam Andre Bayo Ala, Beberapa Pendekatan dan Strategi Memerangi

cukup pelik dan sangat sukar untuk dicari akar permasalahannya karena sudah sangat mengakar. Di lain pihak jumlah kemiskinan yang semakin meningkat juga memperlihatkan kegagalan pemerintah menjalankan tugasnya sebagai aparatur negara. Gagal disini berarti pemerintahan yang sedang berjalan tidak sanggup lagi untuk mencari jalan keluar permasalahan kemiskinan ini dengan segera. Perlu kita ketahui bersama , bahwa saat ini wilayah-wilayah kemiskinan di Indonesia sebagian besar terpusat di desa-desa. Namun hal itu tidak berarti bahwa di daerah perkotaan tidak dihadapkan pada masalah kemiskinan. Hanya saja jumlahnya yang mungkin berbeda dengan kemiskinan di wilayah pedeasaan.

Partohardjono dan kawan-kawan (1993) dari litbang departemen Pertanian yang melakukan penelitian tentang karakteristik daerah di pedesaan miskin, menemukan beberapa variabel yang mencirikan kemiskinan di pedesaan yang pada umumnya disebabkan karena faktor lemahnya posisi sumber daya manusia, sumber daya alam, kurangnya penguasaan teknologi, lemahnya aspek kelembagaan dan lemahnya infrastruktur, termasuk budaya, sikap dan motifasi. Lemahnya aspek sumberdaya manusia ini dapat dilihat dari masih besarnya jumlah penduduk yang tidak lulus Sekolah Dasar (SD), kurang terampilnya masyarakat yang mengakibatkan rendahnya tingkat pengetahuan[8]. Akibat situasi yang seperti itu maka tingkat sosial ekonominya juga rendah,

[8] partodihardjo. S. Ismail I.G. Subandi, Adnyana. M.O &Darmawan D.A(1993) Peranan sistem usaha tani terpadu dalam upaya mengentaskan kemiskinan di berbagai Argoekosistem. Makalh disampaikan pada simposium Penelitian Tanaman Pangan III di Bogor 23 –25 Agustus 1993.

akhirnya mereka terperangkap pada *poverty trap* / jebakan kemiskinan. Di luar Jawa, hal ini terlihat dengan kebiasaan ladang berpindah atau penduduk miskin bercocok tanam dengan tingkat penguasaan teknologi yang rendah.

Rendahnya sumber daya alam juga merupakan karakteristik daerah miskin. Lebih dari separuh daerah miskin memiliki lahan yang tingkat kesuburannya rendah, kondisi lahannya rawan erosi, dan topografinya bergelombang atau bergunung. Untuk daerah miskin yang berada di daerah banyak hujan dicirikan oleh seringnya banjir. Tetapi di daerah yang kurang hujan dicirikan oleh keringnya lahan pertanian. Selanjutnya faktor lemahnya penguasaan teknologi menyebabkan cara bercocok tanam yang sederhana, sehingga produktifitas pertanian menjadi rendah. Sementara itu faktor infrastruktur yang mencirikan daerah miskin adalah prasarana jalan dan perhubungan yang kurang memadai, sarana air yang kurang, pasar kurang tersedia begitu juga sarana pendidikan dan kesehatan yang juga kurang.

Faktor kelembagaan yang mencirikan daerah miskin adalah lemahnya peran kelembagaan formal yang disebabkan karena kelembagaan informal yang masih dominan. Struktur organisasi, teknologi, tujuan dan partisipasi masyarakat yang disyaratkan dalam kelembagaan formal sering tidak sesuai dengan lingkungan setempat. Dari penjelasan tersebut dapat kita ambil kesimpulan sementara bahwa kelemahan terhadap penguasaan pengetahuan, keterampilan, sumber daya

alam, teknologi, infrastruktur dan kelembagaan sangat menonjol dalam meningkatkan dan mempertahankan daerah –daerah miskin.

Di berbagai Kabupaten di Indonesia, khususnya di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, masalah kemiskinan ini menjadi masalah utama dari tujuh masalah pokok yang dimiliki masing-masing daerah.[9] Selain masalah kemiskinan ini masalah pokok yang dihadapi oleh daerah adalah masalah pengangguran, masalah kesehatan, masalah pendidikan serta rendahnya sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Terlepas dari hal ini masalah kemiskinan ini adalah masalah yang pokok dan mendasar yang dihadapi oleh seluruh masyarakat di dunia.

Kemiskinan itu sendiri bila ditelusuri lebih lanjut ada dua jenis bila dibedakan menurut jenisnya[10], yaitu:

a. Kemiskinan Relatif.

   Merupakan kemiskinan yang dinyatakan dengan berapa persen dari pendapatan nasional yang diterima oleh kelompok penduduk dengan kelas pendapatan tertentu dibandingkan dengan proporsi pendapatan nasional yang diterima oleh kelompok penduduk dengan kelas pendapatan lainnya.

b. Kemiskinan Buatan

   Adalah kemiskinan yang terjadi karena struktur sosial yang ada membuat anggota kelompok masyarakat tidak menguasai sarana ekonomi dan fasilitas-fasilitas secara merata.kemiskinan buatan ini

[9] Kemiskinan Menjadi Masalah Pokok Bagi Daerah, Kedaulatan Rakyat.com

identik dengan kemiskinan struktural. Sebagaimana diungkapkan oleh Selo Sumarjan bahwa kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang dialami oleh suatu golongan masyarakat karena struktur sosial masyarakat itu tidak dapat ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka.[11]

Ciri utama dari kemiskinan struktural ini adalah tidak terjadinya sesuatu hal yang disebut mobilitas sosial vertikal, kalaupun terjadi itu sifatnya sangat lamban.

Dalam mengukur tingkat kemiskinan banyak sekali digunakan berbagai cara ataupun kriteria pengukuran. Pada umumnya kriteria yang dipakai dalam mengukur garis kemiskinan ini adalah dengan membandingkan proporsi pendapatan nasional yang diterima oleh 40 persen penduduk dengan pendapatan rendah dengan 40 persen penduduk berpendapatan tinggi[12]. Lain lagi apabila pengukuran kemiskinan itu menurut Prof Sajogyo. Dimana menurut beliau bahwa pengukuran kemiskinan dapat dilakukan dengan pendekatan absolut. Cara yang dikembangkan oleh beliau adalah dengan memperhitungkan standar kebutuhan pokok berdasarkan atas kebutuhan beras dan gizi. Ada 3 golongan orang miskin menurut beliau yaitu; golongan paling miskin yang mempunyai pendapatan perkapita per tahun beras 240 kg atau kurang, golongan miskin sekali yang mendapatkan pendapatan perkapita per tahun beras sebanyak 240 kg hingga 360 kg dan yang terakhir adalah lapisan

[11] Selo sumarjan, Aspek Sosial Budaya Pembangunan Desa dalam Masyarakat, 1990

masyarakat miskin yang memiliki pendapatan perkapita beras per tahun lebih dari 360 kg akan tetapi kurang dari 480 kg.[13]

Kemudian kriteria lainnya adalah yang dirumuskan oleh Biro Pusat Statistik. Lembaga ini memberikan alternatif guna pengukuran garis kemiskinan dengan menentukan berapa dasar kalori minimum yang harus disediakan setiap orang dalam sehari minimal adalah sebesar 2100 kalori. Namun tidak hanya hal itu saja, karena ada hal-hal lain yang harus juga dipertimbangkan adalah kebutuhan-kebutuhan non pangan, seperti kebutuhan sandang, perumahan, penerangan, pendidikan, bahan bakar serta jasa–jasa yang diperlukan. Kemudian kriteria-kriteria itu diubah dalam bentuk angka rupiah sebesar Rp. 27.905 untuk wilayah perkotaan serta RP 18. 244 untuk wilayah pedesaan.[14] Kriteia lainnya yang juga sering digunakan adalah yang diterapkan oleh Bank Dunia. Dimana dalam kriteria ini menggunakan pendapatan sebagai tolak ukurnya. Ukurannya adalah 50 Dolar Amerika perkapita per tahun untuk daerah pedesaan. Sedangkan untuk daerah perkotaan sebesar 75 dollar Amerika per kapita per tahun.

Upaya penanggulangan kemiskinan ini sudah seringkali dilakukan oleh pemerintah dengan berbagai cara. Juga sudah sekian lama berbagai alternatif penyelesaian masalah kemiskinan ini digunakan oleh pemerintah. Dalam kaitannya dengan program otonomi daerah maka penanggulangan kemiskinan ini dapat dilakukan dengan cara instrumen-

[13] Sajogyo, Golongan Miskin di Pedesaan, 1997
[14] Biro Pusat Sttistik, 1993

instrumen yang akan digunakan pemerintah pusat adalah regulasi berupa pedoman pedoman teknis tentang standar minimal pelayanan, bantuan-bantuan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat miskin, serta penghargaan-penghargaan yang diberikan dalam rangka meningkatkan motivasi dan prestasi rakyat miskin.

Sejalan dengan kebijakan desentralisasi maka, maka upaya penanggulangan kemiskinan akan difokuskan pada enam agenda yaitu sebagai berikut[15]:

a. Menetapkan kebijakan penanggulangan kemiskinan sebagai "Gerakan Nasional Penanggulangan Kemiskinan" agar semua pihak yakni pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, dan perguruan tinggi mempunyai komitmen yang sama dan berperan aktif dalam upaya pemberantasan kemiskinan.
b. Menempatkan pemerintah daerah sebagai penanggungjawab utama dalam pengelolaan program penanggulangan kemiskinan agar tercipta proses internalisasi tanggung jawab kepada pemerintah daerah, sehingga mengurangi pola sentralistik.
c. Mengembangkan kapasitas pemerintah daerah dalam otonomi penyelenggaraan otonomi daerah dalam rangka mendukung upaya penanggulangan kemiskinan.
d. Meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam menyediakan fasilitas pelayanan umum yang paling mendasar bagi masyarakat

[15] Hendriawan, Penanggulangan Kemiskinan Dalam Rangka Kebijakan Desentralisasi. Program Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor

termasuk bagi penduduk miskin melalui pengembangan standar pelayanan minimal.

e. Melakukan upaya penanggulangan kemiskinan secara komperhensif dalam rangka pemberdayaan masyarakat miskin.

f. Meningkatkan efektivitas pendayagunaan dana bantuan luar negeri dalam menanggulangi program kemiskinan. Implikasi utama dari kebijakan penanggulangan kemiskinan yang bersifat desentralistik tersebut adalah adanya kemungkinan terjadi resistensi dari beberapa instansi pemerintah pusat. Untuk itu, pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan tertentu masih perlu dilaksanakan oleh pemerintah pusat, seperti program pelayanan dasar dalam bidang pendidikan dan kesehatan.

Selain itu pemerintah juga memberdayakan unit-unit usaha kecil menengah, dengan digunakannya model sistem ekonomi kerakyatan yang bertopang pada koperasi dan usaha kecil menengah dimana cara ini tergolong ampuh dan sudah teruji kemampuannya dalam menghadapi krisis. Jadi dengan diberdayakannya sektor Usaha Kecil dan Menengah maka diharapkan dapat menjadi tameng yang cukup kuat dalam menghadapi masalah kemiskinan ini.

Ada juga program yang lainnya seperti Program Jaring Pengaman Sosial, program Inpres Desa Tertinggal, Operasi Pasar Khusus. Menurut program pembangunan tahun 2000-2004 didalamnya disebutkan bahwa

harus ditempuh. Pertama adalah dengan diberlakukannya berbagai upaya dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok dan melindungi keluarga atau kelompok masyarakat yang mengalami kemiskinan sebagai akibat dari dampak negatif dari krisis ekonomi dan kemiskinan struktural. Kedua, melakukan berbagai upaya untuk membantu masyarakat yang mengalami masalah kemiskinan struktural antara lain dengan memberdayakan mereka agar mereka mempunyai kemampuan yang tinggi untuk melakukan usaha dan mencegah terjadinya kemiskinan baru. Dan mengingat masalah kemiskinan ini adalah sebuah permasalahan yang cukup kompleks serta multidimensi maka sangat diperlukan adanya suatu strategi yang komprehensif yang meliputi kebijakan makro dan lintas sektoral seperti :

a. Percepatan ekonomi yang berkelanjutan.
b. Pengendalian pertumbuhan penduduk.
c. Peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan.
d. Perluasan akses bagi usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi terhadap sumber pembiayaan, teknologi dan pasar.
e. Percepatan pembangunan desa.

Ada setidaknya dua buah strategi utama untuk menanggulangi kemiskinan yang dilakukan melalui kebijakan pemerintah yaitu:

1. Pendistribusian kembali kekayaan aset-aset dan hasil-hasil negara yang diperuntukan bagi kalangan miskin yaitu :
   a. Kebijakan fiskal dan kredit.

b. Memperbaiki akses terhadap lahan pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan gizi.

c. Mengarahkan kembali produksi dan permintaan menuju kearah barang-barang konsumsi massa yang secara intensif menyerap kaum buruh melalui pengubahan beberapa faktor dan harga produksi.

2. Merealokasikan secara marginal sumber-sumber produktif dikalangan kaum miskin.

**3. Dana Bantuan Langsung Tunai**

Merupakan program pemerintah yang disebabkan karena pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak. Subsidi yang selama ini diberikan dalam bentuk pengurangan harga BBM dialihkan dengan cara memberikannya secara langsung kepada rakyat miskin. Dana Bantuan Langsung Tunai ini sebenarnya diberikan juga dalam bentuk lain yaitu berupa dana kesehatan dan dana Bantuan Operasional Sekolah. Dana yang disalurkan melalui kesehatan diantaranya dilakukan dengan cara penggratisan fasilitas rumah sakit kelas tiga kepada konsumen atau masyarakat dalam hal ini yang mengguanakan fasilitas kartu Gakin (Keluarga Miskin). Hal lainnya adalah dilakukan dengan cara penigkatan fasilitas-fasilitas rumah sakit sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Sedangkan dana yang disalurkan melalui BOS (Bantuan Operasional Sekolah) disalurkan dengan cara memberikannya kepada

sekolah-sekolah sebagai upaya untuk mengganti dana operasional yang selama ini dikeluarkan oleh sekolah dan ditanggung oleh para siswa. Sehingga diharapkan para siswa tidak terbebani lagi dengan iuran-iuran yang selama ini dilakukan oleh pihak sekolah. Namun BOS (Bantuan Operasional Sekolah) ini hanya diberikan kepada sekolah sampai pada tingkat SMP (Sekolah Menengah Pertama), hal ini tentunya disesuaikan dengan program pemerintah yaitu Wajar (Wajib Belajar) 9 tahun. Dana ini tidak boleh diselewengkan untuk keperluan yang lain.

Dan cara yang ketiga adalah memberikan dana kompensasi kenaikan BBM secara langsung kepada masyarakat. Banyak istilah yang digunakan untuk menamai program ini seperti Subsidi Langsung Tunai (SLT), Bantuan langsung Tunai (BLT) dan lain sebagainya. Dana ini diberikan selama 1 tahun secara bertahap, masing-masing tahap berlangsung selama tiga bulan. Tahap pertama diberikan pada bulan Oktober tahun 2005, tahap kedua dilakukan pada bulan Januari tahun 2006, tahap ketiga diberikan pada bulan April tahun 2006 dan tahap keempat atau tahap terakhir disalurkan pada bulan Juli tahun 2006. Pada masing-masing tahap masing-masing keluarga miskin mendapatkan RP 300.000/ kepala keluarga.

## F. Definisi Konseptual

Pada tahap definisi konseptual ini berusaha menjelaskan mengenai

abstraksi hal-hal yang diamati agar tidak terjadi kesalahpahaman. Dengan demikian definisi konseptual adalah metode penelitian yang terpenting dan merupakan definisi yang dipakai oleh para peneliti untuk menggambarkan secara abstrak suatu fenomena sosial atau fenomena alami.

1. Implementasi program

   Merupakan suatu rangkaian kegiatan atau tindakan yang dilakukan berdasarkan kebijakan yang telah dirumuskan dan disahkan. Pelaksanaan pengendalian aksi-aksi kebijakan dalam kurun waktu tertentu.

2. Kemiskinan

   Adalah suatu keadaan dimana pendapatan atau penerimaan yang diperoleh seseorang sebagai imbalan kerja mereka jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan kebutuhan pokoknya.

3. Dana Bantuan Langsung Tunai.

   Adalah dana yang berasal dari pengurangan subsidi harga BBM yang semula diberikan dalam bentuk pengurangan harga BBM dan kemudian diberikan secara langsung dalam bentuk uang. Penyaluran dilakukan secara bertahap sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

## G. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan indikator-indikator yang dibutuhkan penyusun dalam penelitian yang diambil atau untuk membuat pertanyaan didalam melakukan wawancara.

1. Implementasi kebijakan program bantuan langsung tunai:

a. Sosialisasi Program

b. Koordinasi pelaksanaan program

c. Pelaksanaan pendataan dan pendistribusian BLT

2. Faktor-faktor pelaksanaan program pemberian Bantuan Langsung Tunai ini adalah sebagai berikut :

a. Informasi pelaksanaan program pemberian Bantuan Langsung Tunai kepada masyarakat miskin.

b. Isi kebijakan pelaksanaan program pemberian Bantuan Langsung Tunai kepada masyarakat miskin.

c. Dukungan implementasi pelaksanaan program pemberian Bantuan Langsung Tunai kepada masyarakat miskin.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu metode penelitian dimana meneliti status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu kondisi dalam sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan penelitian deskriptif kualitatif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, tabel, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.[16]

---

[16] Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980, hal 63

**2. Unit Analisa**

Berdasarkan masalah yang diteliti dan ditulis dimuka, maka yang menjadi unit analisis adalah individu atau masyarakat yang terlibat langsung dalam program pemberian Bantuan Langsung Tunai ini. Kemudian unit analisis data yang dapat diperoleh keterangannya adalah :

a. Individu atau masyarakat penerima manfaat BLT di Kecamatan Temon.

b. Aparat pemerintah yang berada disekitar program BLT ini

c. Aparat pemerintahan di Kecamatan Temon

**3. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian tentang "Implementasi Program Pemberian Dana Kompensasi BBM kepada Rakyat Miskin adalah di kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo. Dikarenakan di Kecamatan tersebut terjadi sedikit terjadi penyimpangan penerima dana Bantuan Langsung Tunai. misalnya orang yang sebenarnya tergolong mampu namun ternyata masih mendapatkan dana ini.

**4. Jenis Data**

Dalam penelitian ini data yang dibutuhkan terdiri atas:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari keterangan pihak-pihak yang terkait langsung dengan masalah yang ada dalam

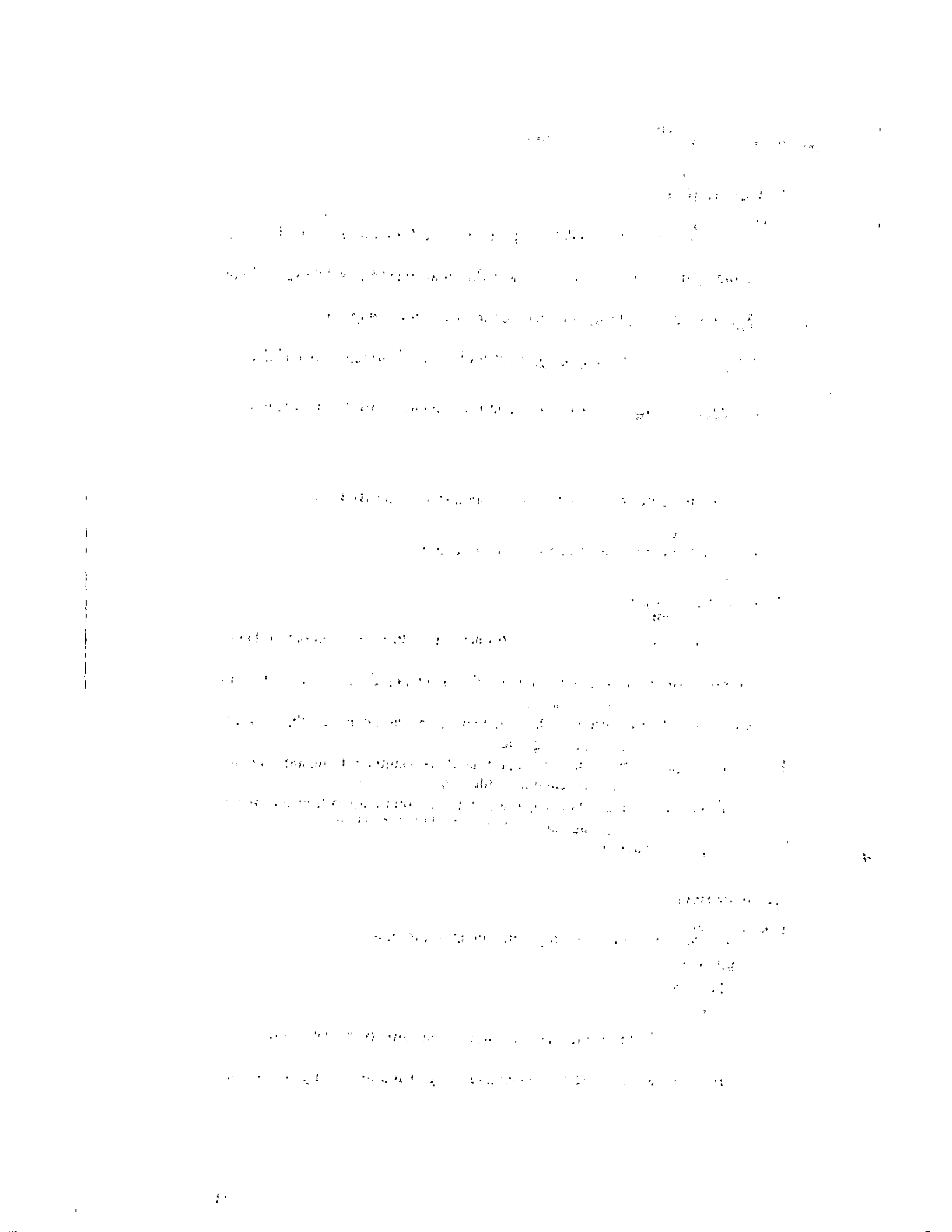

penelitian ini. Seperti masyarakat desa di lokasi penelitian, perangkat dan lain sebagainya.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dimbil atau didapatkan dari buku-buku, media massa. Serta berbagai dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang terkait langsung dengan masalah yang diteliti.

**5. Teknik pengumpulan Data**

a. Wawancara *(interview)*

Merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara secara langsung, tujuannya untuk mendapatkan informasi atau keterangan yang lebih jelas tenang berbagai aspek yang berkaitan dengan masalah peningkatan kualitas pendidikan.

b. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan secara langsung. Meneliti secara langsung kondisi atau keadaan yang sebenarnya yang ada dilapangan, sehingga data ini bermanfaat untuk mendukung dan melengkapi data primer dan data sekunder.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara mempelajari data yang mendukung penelitian yang dapat diperoleh dengan menggunakan

sebagai bahan literatur yang diperoleh dari buku, jurnal, media massa, serta sumber-sumber relevan lainnya yang terkait dengan permasalahan.

d. Kuesioner

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara membuat daftar pertanyaan secara tertulis yang terdiri dari item-item pertanyaan, dimana setiap item-item pertanyaan dijawab atau dikerjakan oleh orang yang menjadi responden dalam penelitian ini.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik purposive random sampling, yaitu pengambilan sampling yang disesuaikan dengan tujuan penelitian ini tidak berdasarkan pada keseluruhan populasi yang ada, dan hanya terbatas pada masyarakat yang hanya menerima bantuan langsung tunai saja.

**6. Populasi dan Sampel**

a. Populasi

Menurut Mantra dan Kastro (1989:152), Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisa yang ciri-cirinya akan diduga. Menurutnya, populasi yang dipilih haruslah memiliki keeratan hubungan dengan masalah yang diteliti. Berdasarkan pendapat diatas, maka populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kecamatan Taman yang berjumlah 2644 Kepala Keluarga

b. Sampel

Menurut Suhardono (2001;2), sampel adalah suatu bagian representatif atau yang mewakili keseluruhan kelompok atau populasi yang diteliti. Karenanya, sampel membutuhkan pengujian atau pengamatan terhadap suatu porsi dari keseluruhan yang menarik perhatian sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan dari populasi yang diteliti sebagai informasi keseluruhan kelompok.

Mengacu pada permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik purposive random sampling (sampel bertujuan). Menurut Prof. DR. H. Hadari Nawawi (2003:157) purposive random sampling adalah pengambilan sampel yang berdasarkan pada tujuan penelitian, dan ukuran sampel tidak dipersoalkan dalam teknik ini. Dalam penelitian ini yang menjadi responden dari masyarakat penerima Bantuan Langsung Tunai berjumlah 200 responden dan diambil secara acak dari beberapa kelurahan yang berbeda.

7. **Teknik Analisis Data.**

Teknik analisa data yang digunakan adalah analisa data kualitatif. Menurut Winarno Surakhmad, penelitian deskriptif yang bersifat kualitatif adalah memutuskan dan menafsirkan data yang ada, misalnya tentang situasi yang sedang dialami, suatu hubungan kegiatan, pandangan sikap yang nampak atau tentang proses yang sedang bekerja, kelainan yang sedang muncul, pertentangan yang sedang meruncing dan lain

sebagainya[17]. Dengan demikian laporan penelitian akan berisi kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan yang berasal dari wawancara, dokumentasi dan observasi

[17] Winarno Surakhmad, 1978, *Dasar-Dasar Teknik research, Bandung,* Tarsito, hal 126